

## STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP						
Tgl Pembuatan						
Tgl Revisi						
Tgl Pengesahan						
Disahkan Oleh	Kepala Biro Hukum					
	HENDRI DONAN, S.H., M.H.					
	NIP. 19750825 200502 1 005					
Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi Publik					

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>Menguasai substansi informasi publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, sopan, dan simpatik</li> </ol>				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Publikasi Produk Hukum Daerah melalui Website JDIH	1. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 5. Alat				
SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik	Tulis 2. Flashdisk 4. Alat Komunikasi				
	Pencatatan dan Pendataan :				
Peringatan:	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik				
	Dokumen pengesahan terkait daftar informasi publik				
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan					

## **URAIAN PROSEDUR**

	AN PROSEDUR	Pelaksana		Mutu Baku				
No	Uraian Kegiatan	Petugas PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing bagian				- Komputer dan Printer - Jaringan Internet - Alat Tulis - Flashdisk - Alat Komunikasi	Berkala	Informasi dari masing-masing bidang/sekretariat	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				<ul> <li>Komputer dan</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Alat Tulis</li> <li>Flashdisk</li> <li>Alat Komunikasi</li> </ul>	Berkala	Informasi ysng telah diakurasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik				- Komputer dan Printer - Jaringan Internet - Alat Tulis	Berkala	Draft Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik				Draft Daftar Informasi Publik	Setelah informasi terkumpul	Draft SK Penetapan Daftar Informasi Publik	
5	Mengesahkan daftar informasi publik				Draft SK Daftar Informasi Publik	Setelah PPID pelaksana menyusun Daftar Informasi Publik	SK Penetapan Daftar Informasi Publik	
6	Mengunggah daftar informasi publik melalui website PPID				Website PPID	Setelah SK Penetapan Informasi Publik ditanda tangani	Daftar Informasi Publik yang telah diupload	

KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, SH., M.H. Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005